

INTERVENSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: MODEL UNTUK MEMUTUS RANTAI KEMISKINAN DI KAWASAN PESISIR SELATAN JAWA BARAT

Willya Achmad¹, Mujahiddin², Dhiya Nabilah Ramadhan³, Boy Iskandar Warongan⁴

^{1,3}Universitas Pasundan, Bandung, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia

⁴Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: willyaachmad@unpas.ac.id

Abstrak

Kemiskinan di kawasan pesisir selatan Jawa Barat merupakan permasalahan multidimensional yang dipengaruhi oleh keterbatasan akses pendidikan, rendahnya kapasitas ekonomi masyarakat, kerentanan terhadap bencana alam, serta minimnya akses terhadap layanan sosial dan permodalan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model intervensi sosial dan pemberdayaan masyarakat yang efektif dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa bantuan sosial konvensional tidak cukup efektif tanpa adanya penguatan kapasitas produktif. Peneliti merumuskan Model Integratif yang mencakup empat pilar utama: rekonstruksi pola pikir melalui literasi keuangan, hilirisasi produk perikanan, penguatan kelembagaan BUMDes sebagai penyangga modal, dan digitalisasi pemasaran. Model ini mengintegrasikan fungsi perlindungan sosial dengan transformasi ekonomi lokal untuk mendorong graduasi mandiri masyarakat pesisir. Implikasi penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi kebijakan lintas sektor dalam menciptakan ekosistem ekonomi pesisir yang tangguh dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Intervensi Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan Pesisir, Hilirisasi.

Abstract

Poverty in the southern coastal areas of West Java is a multidimensional problem influenced by limited access to education, low economic capacity, vulnerability to natural disasters, and limited access to social services and capital. This study aims to formulate an effective model for social intervention and community empowerment to sustainably break the cycle of poverty. Using a qualitative descriptive approach with a case study method, data was collected through participant observation, in-depth interviews, and documentation. The research findings indicate that conventional social assistance is insufficiently effective without strengthening productive capacity. The researchers established an Integrative Model encompassing four main pillars: mindset reconstruction through financial literacy, downstreaming of fishery products, strengthening village-owned enterprise (BUMDes) institutions as capital buffers, and digitalizing marketing. This model integrates social protection functions with local economic transformation to encourage independent coastal communities. The implications of this research highlight the importance of cross-sectoral policy synergy in creating a resilient and sustainable coastal economic ecosystem.

Keywords: Social Intervention, Community Empowerment, Coastal Poverty, Downstreaming.

A. PENDAHULUAN

Selama bertahun-tahun, kemiskinan menjadi persoalan global yang terus dikaji dari beragam perspektif teoretis, tanpa terbatas oleh konteks wilayah maupun pendekatan solusi yang ditawarkan (Ishatono & Raharjo, 2016). Fenomena ini bersifat kompleks dan multidimensional karena mencakup berbagai dimensi, seperti aspek struktural dan kultural, faktor individual dan sosial, serta kategori kemiskinan absolut dan relatif (Mansur, 2024). Selain itu, kemiskinan juga berkaitan erat dengan kondisi kewilayahan, kebijakan sosial, serta dinamika politik yang memengaruhi distribusi sumber daya dan akses terhadap layanan publik. Oleh sebab itu kemiskinan tidak dapat dipandang sebagai kondisi yang bersifat universal dan seragam, melainkan sangat kontekstual dan dipengaruhi oleh pola hidup masyarakat, struktur ekonomi yang berlaku, keterbatasan akses terhadap sumber daya produktif, tingkat pendidikan, hingga faktor geografis seperti keterpencilan suatu daerah (Sarjito, 2023).

Berdasarkan data profil kemiskinan terbaru pada Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Kondisi ini menyebabkan besarnya Garis Kemiskinan (GK) per rumah tangga miskin secara rata-rata meningkat menjadi Rp 2.786.415,00/rumah tangga miskin/bulan (Jabarprovgoid, 2014). Angka tersebut merupakan nilai minimum yang harus dikeluarkan sebuah rumah tangga setiap bulannya untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan agar tidak dikategorikan sebagai penduduk miskin. Sebagai informasi tambahan, garis kemiskinan per kapita secara nasional pada periode yang sama tercatat sebesar Rp 582.912,00 per bulan, yang menunjukkan adanya kenaikan biaya hidup minimum dibandingkan tahun-tahun sebelumnya (BPS, 2024).

Masyarakat pesisir, khususnya nelayan, selama ini identik dengan kondisi kemiskinan dan kerap disebut sebagai kelompok miskin ekstrim karena menghadapi tekanan ekonomi yang berlapis (Najib dkk, 2024). Ketergantungan pada hasil tangkapan yang sangat dipengaruhi musim, cuaca, dan perubahan iklim menyebabkan pendapatan nelayan bersifat fluktuatif dan tidak menentu (Dewi & Rusydi, 2025). Namun, persoalan kemiskinan di wilayah pesisir tidak semata-mata berkaitan dengan rendahnya pendapatan, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan institusional yang kompleks. Akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, permodalan, teknologi penangkapan ikan, hingga pasar distribusi sering kali terbatas (Sipahelut dkk, 2011). Di sisi lain, lemahnya posisi tawar nelayan dalam rantai distribusi hasil laut serta ketergantungan pada tengkulak memperparah kondisi ekonomi mereka. Secara sosial, rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya penguatan kelembagaan lokal turut membatasi peluang mobilitas sosial (Wibowo dkk, 2025).

Memutus mata rantai kemiskinan di kawasan pesisir memerlukan strategi yang tidak hanya berorientasi pada bantuan sesaat, tetapi juga pada intervensi sosial yang terencana dan berkelanjutan (Faoziyah, 2020). Intervensi sosial berfungsi sebagai upaya sistematis untuk memperbaiki kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan akses terhadap pendidikan, perlindungan sosial, serta penguatan kapasitas individu dan kelompok (Sholichah dkk, 2025). Dalam konteks masyarakat nelayan, intervensi ini dapat diwujudkan melalui penyediaan pelatihan keterampilan alternatif, akses terhadap permodalan yang adil, penguatan koperasi nelayan, serta regulasi yang melindungi posisi tawar mereka dalam rantai distribusi hasil laut. Pendekatan ini penting untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini membatasi mobilitas ekonomi masyarakat pesisir dan memperkuat fondasi sosial yang mendukung kemandirian (Rahardjo & Djumiarti, 2017).

Sejalan dengan itu, pemberdayaan masyarakat menjadi elemen kunci dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan (Setyawan dkk, 2025). Pemberdayaan tidak sekadar memberikan bantuan, tetapi mendorong masyarakat untuk memiliki kontrol atas sumber daya, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan, serta mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki (Triatmanto dkk, 2024). Melalui penguatan modal sosial, pengembangan usaha berbasis potensi kelautan dan pariwisata, serta kolaborasi multipihak

antara pemerintah, swasta, dan komunitas, masyarakat pesisir dapat bertransformasi dari objek pembangunan menjadi subjek pembangunan (Arafah dkk, 2025). Dengan integrasi antara intervensi sosial dan pemberdayaan yang partisipatif, upaya memutus siklus kemiskinan antar-generasi di wilayah pesisir menjadi lebih realistis dan berkelanjutan.

Artikel ini ditulis untuk mengeksplorasi secara lebih mendalam dinamika kemiskinan masyarakat pesisir serta kemungkinan model intervensi sosial dan pemberdayaan yang relevan untuk memutus rantai kemiskinan tersebut. Fokus penelitian diarahkan pada rumah tangga miskin yang tinggal di kawasan pesisir pantai selatan Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur. Wilayah ini dipilih karena merepresentasikan karakteristik umum masyarakat pesisir yang menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dasar. Selain itu, ketergantungan pada sektor perikanan tradisional dengan tingkat pendapatan yang tidak stabil menjadikan rumah tangga di wilayah ini rentan terhadap guncangan ekonomi dan perubahan lingkungan.

Beberapa penelitian terdahulu mengkaji bagaimana kondisi dan Upaya masyarakat pesisir dalam memutus kemiskinan di wilayahnya. Penelitian Syamsuddin (2024), menjelaskan ketergantungan nelayan di perairan Teluk Tomini Kabupaten Bonebolango pada satu sumber pendapatan (hasil tangkap) membuat mereka rentan jatuh miskin saat musim paceklik atau cuaca buruk. Penelitian selanjutnya oleh Kusumaningrum (2013) dalam studinya tentang kemiskinan masyarakat pesisir di Kabupaten Purworejo, menyebutkan bahwa bahwa kemiskinan di pesisir bukan hanya soal ekonomi, tapi juga budaya dan struktur sosial (seperti keterikatan pada tengkulak). Modal sosial yang kuat di desa nelayan seringkali belum dimanfaatkan secara formal untuk pemberdayaan. Terakhir penelitian yang dilakukan Butarbutar dkk (2020), menjelaskan bahwa intervensi yang melibatkan istri nelayan dalam pemberdayaan terbukti lebih efektif meningkatkan pendapatan harian rumah tangga dibanding hanya memberikan bantuan alat tangkap kepada nelayan pria.

Dari penelitian-penelitian tersebut maka terdapat gap penelitian dimana bagaimana model intervensi sosialnya (seperti pendampingan psikologis atau penguatan kelembagaan) agar masyarakat konsisten menjalankan diversifikasi tersebut. Selanjutnya juga bisa mengembangkan model kelembagaan modern (seperti BUMDes atau Koperasi Berbasis Digital) sebagai intervensi untuk mengorganisir modal sosial tersebut guna memutus rantai ketergantungan pada tengkulak. Terakhir bisa melakukan penelitian integrasi antara teknologi tepat guna dan akses pasar yang lebih luas (e-commerce), sehingga pemberdayaan perempuan pesisir ini skalanya menjadi lebih besar dan berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan dan menganalisis model intervensi sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat guna memutus rantai kemiskinan di kawasan pesisir melalui peningkatan kapasitas keterampilan produktif, penguatan kemandirian kelembagaan lokal, serta optimalisasi potensi sumber daya laut yang berkelanjutan agar masyarakat mampu keluar dari kerentanan ekonomi secara mandiri.

B. METODE

Untuk mengkaji secara menyeluruh proses intervensi sosial dan dinamika pemberdayaan masyarakat di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus (Creswell, 2019). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipatif terhadap aktivitas ekonomi di pesisir Jayagiri dan wawancara mendalam dengan informan kunci, termasuk pejabat desa, pemimpin kelompok nelayan, UMKM, dan keluarga penerima manfaat program bantuan. Untuk mendapatkan pandangan yang tidak bias terhadap kondisi sosial ekonomi daerah tersebut, data sekunder juga dikumpulkan melalui analisis dokumen profil desa dan statistik kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Cianjur.

Untuk menentukan efektivitas program yang sedang berjalan dan kesulitan yang dihadapi di lapangan, analisis data dilakukan secara metodis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Huberman & Miles, 1992). Studi ini berfokus pada bagaimana keterlibatan aktif masyarakat dan intervensi pemerintah dapat bekerja sama untuk mengelola potensi sumber daya laut dan mendiversifikasi mata pencaharian di wilayah Sindangbarang. Diharapkan temuan analisis ini akan menciptakan model pemberdayaan yang layak dan berkelanjutan yang dapat meningkatkan kemandirian ekonomi dan mengakhiri ketergantungan masyarakat pesisir Jayagiri pada bantuan sosial yang bersifat sementara.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kemiskinan di Pesisir Selatan Jawa Barat

Ketergantungan pada hasil laut menjadi faktor utama kemiskinan yang mengakar di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang. Masyarakat setempat masih memegang memori kolektif tentang masa kejayaan pesisir selatan Cianjur, di mana generasi kakek dan nenek mereka mampu memperoleh hasil laut yang melimpah hanya dengan peralatan sederhana di area pinggiran pantai. Pada masa itu, ekosistem pesisir masih menyediakan sumber pangan dan ekonomi yang stabil, sehingga kebutuhan hidup sehari-hari dapat terpenuhi tanpa harus menempuh risiko tinggi di lautan lepas.

Namun, realitas saat ini telah berubah drastis akibat degradasi lingkungan dan perubahan pola arus di samudera Hindia yang menyebabkan ikan hampir mustahil ditemukan di area pesisir desa. Kelangkaan sumber daya ini memaksa para nelayan di Jayagiri untuk melakukan perubahan pola tangkap yang ekstrem demi menyambung hidup. Mereka kini harus rela melaut selama berminggu-minggu hingga satu bulan penuh menuju perairan yang jauh dan lebih berbahaya, yang secara langsung meningkatkan biaya operasional untuk bahan bakar dan logistik namun tanpa jaminan hasil tangkapan yang sebanding.

Kondisi ini menciptakan jebakan kemiskinan yang sulit diputus bagi keluarga nelayan di Sindangbarang. Ketika modal habis untuk membiayai perjalanan melaut yang jauh sementara hasil tangkapan tidak menentu, para nelayan sering kali terjatuh utang untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga yang ditinggalkan di darat. Ketidakpastian pendapatan dari sektor kelautan ini menunjukkan bahwa model nafkah tunggal tidak lagi relevan, sehingga diperlukan intervensi pemberdayaan yang mampu membuka peluang ekonomi baru di luar ketergantungan pada hasil tangkap mentah.

Struktur ekonomi rumah tangga di Desa Jayagiri terjatuh dalam siklus utang harian yang sulit diputus akibat penghasilan nelayan, terutama yang berstatus sebagai anak buah kapal (ABK), sangat minim dan tidak menentu. Untuk menyambung hidup, hampir seluruh rumah tangga miskin di wilayah pesisir Sindangbarang ini bergantung pada sistem kredit di toko kelontong atau warung tetangga guna memenuhi kebutuhan pokok seperti beras dan bumbu dapur. Praktik berutang ini menjadi strategi bertahan hidup utama bagi para istri nelayan, terutama saat suami mereka sedang pergi melaut dalam waktu lama dan tidak ada pemasukan tunai yang tersisa di rumah.

Harapan besar biasanya digantungkan pada kepulangan suami dari laut dengan membawa bagi hasil yang cukup untuk melunasi tumpukan utang di warung tersebut. Namun, kenyataan di pesisir selatan Cianjur sering kali tidak sejalan dengan harapan; akibat cuaca buruk atau hasil tangkapan yang nihil, nelayan sering pulang dengan tangan hampa atau bahkan membawa beban biaya operasional yang harus ditanggung. Kondisi ini menyebabkan utang kebutuhan rumah tangga tidak terbayar dan justru semakin menumpuk, menciptakan beban psikologis dan finansial yang terus menghimpit kesejahteraan keluarga nelayan dari waktu ke waktu.

Di sisi lain, nelayan kecil di Jayagiri juga terjebak dalam ketergantungan modal kepada tengkulak atau pemilik kapal (juragan) untuk membiayai perbaikan alat tangkap atau bahan

bakar. Pinjaman ini sering kali mengikat nelayan dalam perjanjian tidak tertulis di mana mereka wajib menjual seluruh hasil tangkapan kepada pemberi pinjaman dengan harga yang dipatok jauh di bawah harga pasar. Mekanisme "ijon" atau pemotongan hasil secara sepihak ini membuat nelayan kehilangan posisi tawar dan keuntungan finansial, sehingga meskipun mereka bekerja keras di laut, pendapatan yang dibawa pulang tidak pernah cukup untuk melepaskan diri dari jeratan utang sistemik tersebut.

Struktur pekerjaan masyarakat di Desa Jayagiri didominasi oleh sektor perikanan tangkap yang secara ekonomi kurang menguntungkan, di mana mayoritas warga hanya bekerja sebagai anak buah kapal pada perahu-perahu berukuran kecil. Keterbatasan modal dan akses terhadap armada yang lebih besar membuat mereka tidak memiliki kuasa atas hasil tangkapan sendiri. Kondisi ini diperparah dengan fakta bahwa status "juragan perahu" di Jayagiri sering kali bersifat semu; meski memiliki kapal, taraf ekonomi mereka tidak jauh berbeda dengan para anak buah kapal. Hal ini terjadi karena hampir seluruh aset produktif, mulai dari perahu hingga alat tangkap, diperoleh melalui pinjaman modal dari agen besar atau bos di luar wilayah desa.

Ketergantungan terhadap pemodal atau agen ini menciptakan mekanisme "cicilan abadi" yang menyedot sebagian besar pendapatan nelayan di pesisir Sindangbarang. Setiap kali nelayan berhasil mendaratkan hasil tangkapan, keuntungan yang diperoleh tidak langsung dirasakan oleh keluarga, melainkan harus dipotong terlebih dahulu untuk membayar bunga dan cicilan utang peralatan. Properti laut yang seharusnya menjadi modal kemandirian justru menjadi beban finansial yang mengikat, sehingga nelayan terjebak dalam siklus kerja keras tanpa akumulasi kekayaan yang nyata, karena nilai tambah ekonomi lebih banyak mengalir kembali kepada para pemilik modal besar.

Hubungan antara nelayan di Desa Jayagiri dan para pemodal ini merupakan manifestasi hubungan patron-klien klasik yang masih bertahan kuat di pesisir selatan Jawa Barat. Meskipun secara sekilas terlihat seperti bantuan kemitraan, relasi ini sering kali bersifat eksploitatif karena nelayan kehilangan kebebasan untuk menentukan harga jual dan tujuan distribusi hasil lautnya. Pola patronase yang tidak seimbang ini menjadi penghambat utama efektivitas program pemberdayaan masyarakat, karena intervensi ekonomi yang masuk sering kali terbentur pada struktur keterikatan utang yang sudah mengakar secara turun-temurun di lingkungan sosial nelayan.

Rendahnya tingkat pendidikan formal menjadi salah satu penghambat utama bagi masyarakat di Desa Jayagiri untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Mayoritas penduduk usia produktif di wilayah pesisir ini hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat dasar atau menengah, yang kemudian terpaksa putus sekolah akibat keterbatasan biaya atau tuntutan untuk membantu ekonomi keluarga dengan melaut sejak dini. Kurangnya ijazah dan kualifikasi akademik ini menutup akses mereka terhadap lapangan kerja sektor formal yang lebih stabil di luar wilayah Sindangbarang, sehingga profesi nelayan tradisional menjadi satu-satunya pilihan yang tersisa secara turun-temurun.

Kondisi tersebut diperparah oleh minimnya pelatihan keterampilan (soft skill maupun hard skill) yang relevan dengan kebutuhan pasar modern atau industri kreatif. Nelayan di Desa Jayagiri umumnya hanya memiliki keahlian spesifik dalam penangkapan ikan secara konvensional, namun buta terhadap teknologi pengolahan hasil laut (hilirisasi) maupun strategi pemasaran digital. Akibat keterbatasan keterampilan alternatif ini, masyarakat tidak memiliki daya tawar atau kemampuan untuk menciptakan nilai tambah dari sumber daya laut yang mereka peroleh, sehingga mereka terus terjebak dalam peran sebagai penyedia bahan mentah dengan keuntungan yang sangat tipis.

Ketiadaan akses terhadap pusat pelatihan dan pendampingan keterampilan di pelosok Cianjur Selatan membuat masyarakat Jayagiri sulit untuk melakukan diversifikasi mata pencaharian saat musim paceklik tiba. Tanpa adanya intervensi berupa edukasi kewirausahaan

atau pelatihan teknis lainnya, warga tidak memiliki "skema cadangan" ekonomi untuk menopang hidup ketika laut tidak lagi memberikan hasil. Ketimpangan pengetahuan ini menciptakan kerentanan sosial di mana masyarakat pesisir tidak hanya miskin secara finansial, tetapi juga miskin akan pilihan hidup, yang pada akhirnya memperkuat rantai kemiskinan sistemik di kawasan pesisir Sindangbarang.

2. Model Intervensi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat integratif dalam Memutus Rantai Kemiskinan Masyarakat Pesisir Selatan Jawa Barat

Upaya memutus rantai kemiskinan di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, memerlukan paradigma baru yang tidak lagi mengandalkan bantuan sosial bersifat karitatif atau pemberian modal semata. Fenomena kemiskinan pesisir yang kompleks—mulai dari jeratan utang hingga ketergantungan pada hasil laut yang kian menipis—menuntut adanya sebuah model intervensi sosial yang dirancang secara integratif. Model ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jangka pendek, tetapi juga menasar pada penguatan struktur sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh melalui sinkronisasi program perlindungan sosial dengan skema pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada potensi lokal dan keberlanjutan lingkungan.

Implementasi model integratif ini menempatkan masyarakat pesisir Jayagiri bukan sekadar sebagai objek penerima manfaat, melainkan sebagai aktor utama dalam transformasi ekonomi desa. Dengan menggabungkan aspek penguatan kapasitas sumber daya manusia, hilirisasi produk perikanan, modernisasi kelembagaan lokal, dan adopsi pemasaran digital, intervensi ini dirancang untuk menghancurkan pilar-pilar kemiskinan sistemik yang selama ini mengakar. Melalui pendekatan yang holistik ini, diharapkan tercipta sebuah ekosistem ekonomi pesisir di Cianjur Selatan yang lebih tangguh, mandiri, dan mampu beradaptasi terhadap perubahan dinamika pasar maupun tantangan ekologis di masa depan.

a. Penggabungan bantuan sosial tunai dengan penguatan kapasitas produktif.

Model intervensi sosial yang integratif di Desa Jayagiri harus dimulai dengan rekonstruksi pola pikir melalui penggabungan bantuan sosial tunai dengan penguatan kapasitas produktif. Dalam skema ini, program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) tidak lagi sekadar menjadi instrumen konsumtif untuk menutupi utang di warung kelontong, melainkan diorkestrasikan sebagai modal dasar untuk meningkatkan literasi keuangan dan keterampilan baru. Intervensi dilakukan melalui pendampingan intensif yang mewajibkan keluarga nelayan mengikuti pelatihan kewirausahaan dan manajemen rumah tangga, sehingga masyarakat memiliki kesiapan mental dan keterampilan teknis untuk beralih dari ketergantungan bantuan menuju kemandirian ekonomi.

Integrasi ini secara operasional menggabungkan fungsi perlindungan sosial dengan pemberdayaan masyarakat dalam satu siklus pendampingan yang berkelanjutan. Intervensi sosial berperan sebagai "jaring pengaman" untuk menjaga stabilitas konsumsi keluarga nelayan di Sindangbarang, sementara pemberdayaan masyarakat berperan sebagai "mesin penggerak" yang memberikan akses pada pengetahuan dan keterampilan teknis. Di Desa Jayagiri, integrasi ini diwujudkan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang anggotanya adalah para penerima bantuan sosial. Dengan demikian, bantuan tunai yang diterima tidak habis untuk kebutuhan harian semata, tetapi sebagian kecil didorong untuk menjadi modal stimulan dalam kelompok usaha produktif, seperti pembuatan pakan ikan mandiri atau pengolahan penggaraman ikan tradisional yang lebih higienis.

Lebih jauh lagi, model integratif ini mengedepankan prinsip graduasi mandiri, di mana target akhir dari intervensi sosial adalah keluarnya keluarga miskin dari daftar penerima bantuan karena telah berdaya secara ekonomi. Pemberdayaan masyarakat dalam hal ini bukan sekadar pelatihan sesaat, melainkan proses penguatan kapasitas yang disinergikan dengan pemanfaatan potensi lokal pesisir Cianjur Selatan. Dengan adanya sinergi antara dana

perlindungan dari pemerintah dan pendampingan keterampilan kewirausahaan, rantai kemiskinan di Desa Jayagiri diputus melalui dua sisi: pemenuhan hak dasar keluarga (melalui intervensi sosial) dan peningkatan daya saing ekonomi (melalui pemberdayaan). Transformasi ini memastikan bahwa masyarakat pesisir tidak hanya mampu bertahan hidup di tengah fluktuasi hasil laut, tetapi juga memiliki ketangguhan untuk mengembangkan usaha yang lebih stabil dan berkelanjutan..

b. Hilirisasi Produk Perikanan

Strategi pemberdayaan masyarakat di Desa Jayagiri selanjutnya difokuskan pada hilirisasi produk perikanan sebagai upaya untuk memutus ketergantungan nelayan terhadap penjualan bahan mentah kepada tengkulak. Model integratif ini menggabungkan intervensi pemerintah dalam penyediaan sarana prasarana pengolahan hasil laut dengan program pelatihan keterampilan teknis bagi kelompok perempuan pesisir. Melalui bantuan teknologi tepat guna, seperti mesin pengering ikan higienis atau alat pengemas vakum, hasil tangkapan nelayan yang selama ini memiliki nilai jual rendah saat musim melimpah dapat diolah menjadi produk turunan seperti ikan asin premium, abon ikan, atau kerupuk ikan. Langkah ini secara efektif menciptakan nilai tambah ekonomi di tingkat lokal dan memperpanjang masa simpan produk, sehingga masyarakat tidak lagi terjebak dalam skema harga sepihak yang sering dimainkan oleh perantara.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks hilirisasi ini dilakukan melalui pendampingan intensif yang mencakup aspek standarisasi produk dan higienitas pangan. Keluarga nelayan di pesisir Sindangbarang tidak hanya diberikan bantuan alat, tetapi juga diberikan pengetahuan mengenai sertifikasi pangan rumah tangga (PIRT) dan teknik pengemasan (branding) yang menarik. Intervensi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk lokal Jayagiri agar mampu menembus pasar yang lebih luas di sepanjang jalan lintas selatan Jawa Barat. Dengan demikian, pemberdayaan ini tidak hanya menyorot pada aspek produksi, tetapi juga pada penguatan rasa percaya diri masyarakat dalam mengelola potensi sumber daya laut mereka secara profesional dan mandiri.

Lebih jauh lagi, model hilirisasi ini menjadi solusi nyata bagi fenomena "kelangkaan ikan di pesisir" dan tantangan cuaca buruk yang sering menghimpit ekonomi nelayan Sindangbarang. Ketika nelayan laki-laki menghadapi risiko tinggi di laut lepas, unit-unit pengolahan di darat yang dikelola oleh kelompok pemberdayaan perempuan menjadi penyangga ekonomi keluarga (safety net) yang stabil. Integrasi antara sektor penangkapan di laut dan sektor pengolahan di darat menciptakan ekosistem ekonomi desa yang lebih resilien. Dengan mengubah orientasi dari sekadar "pencari ikan" menjadi "pengelola industri perikanan skala rumah tangga", rantai kemiskinan di Desa Jayagiri dapat diputus melalui terciptanya kemandirian pendapatan yang tidak lagi sepenuhnya bergantung pada fluktuasi hasil tangkap harian..

c. Penguatan Kelembagaan Lokal

Model intervensi sosial yang integratif di Desa Jayagiri harus menyentuh akar persoalan struktural, yaitu ketergantungan nelayan pada sistem patron-klien yang eksploitatif. Penguatan kelembagaan lokal melalui optimalisasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau Koperasi Nelayan menjadi instrumen pemberdayaan utama untuk menggantikan peran tengkulak atau agen besar yang selama ini menguasai rantai modal dan distribusi. Intervensi dilakukan dengan memosisikan lembaga desa sebagai penyedia input produksi, seperti bahan bakar, alat tangkap, dan modal usaha dengan skema pembiayaan yang adil. Dengan adanya lembaga penyangga ini, nelayan di pesisir Sindangbarang tidak lagi terpaksa menjaminkan hasil tangkapannya kepada pemodal perseorangan, sehingga kemandirian finansial masyarakat dapat terbangun secara kolektif.

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks kelembagaan ini dilakukan melalui pendampingan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel di tingkat desa. Masyarakat

Desa Jayagiri dilatih untuk mengelola unit usaha desa yang berfungsi sebagai pusat penampungan dan pemasaran bersama (cooperative marketing). Lembaga ini berperan dalam menjaga stabilitas harga hasil laut di tingkat lokal, sehingga saat tangkapan melimpah, harga tidak jatuh karena adanya standarisasi harga yang dikelola oleh BUMDes. Intervensi sosial ini bertujuan untuk meningkatkan posisi tawar nelayan terhadap pasar luar, di mana hasil laut tidak lagi keluar dari wilayah Sindangbarang melalui rantai distribusi yang terlalu panjang dan merugikan produsen kecil di Jayagiri.

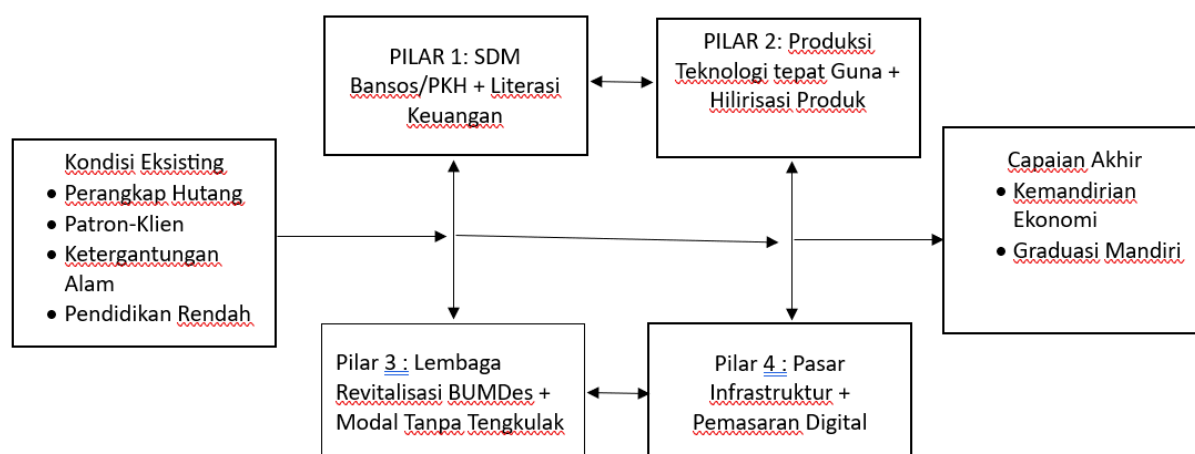
Lebih jauh lagi, penguatan lembaga ini menjadi wadah bagi terciptanya modal sosial (social capital) yang kuat untuk memutus rantai kemiskinan sistemik. Dengan terintegrasinya program bantuan pemerintah (seperti dana desa atau hibah kementerian) ke dalam unit usaha BUMDes, masyarakat memiliki akses terhadap skema perlindungan ekonomi yang lebih berkelanjutan daripada sekadar bantuan tunai individu. Kelembagaan yang sehat di Desa Jayagiri akan berfungsi sebagai pelindung bagi nelayan dari fluktuasi ekonomi dan jeratan utang ijon. Melalui sinergi antara intervensi kebijakan desa dan partisipasi aktif warga dalam koperasi, struktur ekonomi pesisir selatan Cianjur dapat bertransformasi dari sistem yang memeras menjadi sistem yang saling menguatkan dan menyejahterakan seluruh anggota komunitas.

d. Digitalisasi Pemasaran dan Akses Pasar Terbuka

Model intervensi sosial di Desa Jayagiri harus disempurnakan dengan digitalisasi pemasaran untuk memutus isolasi geografis dan memperpendek rantai distribusi hasil laut di pesisir selatan Cianjur. Pemberdayaan masyarakat dalam aspek ini diarahkan pada pemanfaatan teknologi informasi guna menghubungkan produsen lokal (nelayan dan UMKM pengolahan ikan) secara langsung dengan konsumen akhir atau pasar yang lebih luas di luar wilayah Sindangbarang. Intervensi dilakukan melalui pelatihan literasi digital bagi generasi muda desa dan kelompok perempuan pesisir, mencakup pengelolaan media sosial sebagai etalase produk, penggunaan platform e-commerce, hingga teknik fotografi produk yang menarik. Langkah ini bertujuan agar nilai ekonomi dari kekayaan laut Jayagiri tidak lagi habis di tangan perantara, melainkan mengalir kembali ke kantong masyarakat desa sebagai keuntungan bersih yang lebih besar.

Integrasi antara pemberdayaan digital dan potensi strategis jalur lintas selatan (JLS) Jawa Barat menjadi kunci utama dalam membuka akses pasar terbuka. Melalui pendampingan dari pendamping desa atau relawan teknologi, masyarakat Desa Jayagiri didorong untuk membangun sistem inventarisasi produk berbasis aplikasi sederhana atau jejaring pemasaran komunitas. Intervensi sosial ini berfungsi sebagai jembatan informasi yang memungkinkan nelayan mengetahui fluktuasi harga pasar secara real-time, sehingga mereka memiliki daya tawar yang lebih kuat. Dengan adanya akses informasi yang transparan, praktik monopoli harga oleh tengkulak dapat diminimalisir, dan produk olahan dari Jayagiri dapat bersaing di pasar regional maupun nasional tanpa terhambat oleh kendala jarak fisik.

Lebih jauh lagi, digitalisasi ini menciptakan ekosistem ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat pesisir Sindangbarang. Pemuda desa yang sebelumnya cenderung merantau karena minimnya peluang kerja, kini dapat berperan sebagai penggerak ekonomi desa melalui peran sebagai pengelola pemasaran digital atau logistik produk laut. Sinergi antara ketersediaan bahan baku hasil laut, pengolahan yang berkualitas, dan pemasaran digital yang masif akan mengubah wajah ekonomi Desa Jayagiri dari desa nelayan tradisional menjadi desa pesisir mandiri yang melek teknologi. Melalui model integratif ini, rantai kemiskinan diputus dengan cara memberikan masyarakat "jendela dunia" untuk memasarkan kemandirian mereka, sehingga kesejahteraan yang dicapai bersifat lebih stabil dan adaptif terhadap kemajuan zaman.



Gambar 1 Model Integratif Intervensi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Selatan Jawa Barat

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena kemiskinan di Desa Jayagiri, Kecamatan Sindangbarang, Kabupaten Cianjur merupakan kemiskinan struktural yang dipicu oleh ketergantungan kronis terhadap komoditas laut mentah dan jeratan relasi patron-klien yang eksploitatif. Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa intervensi sosial yang bersifat karitatif (bantuan tunai) tidak cukup kuat untuk memutus rantai kemiskinan sistemik tanpa dibarengi dengan transformasi kapasitas produktif. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan Model Intervensi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Integratif sebagai strategi holistik. Model ini mengintegrasikan fungsi perlindungan sosial dengan empat pilar transformasi ekonomi: (1) rekonstruksi pola pikir melalui literasi keuangan; (2) hilirisasi produk perikanan guna menciptakan nilai tambah (*value-added*); (3) penguatan kelembagaan BUMDes sebagai penyangga modal untuk memutus dominasi tengkulak; dan (4) digitalisasi akses pasar guna memangkas rantai distribusi yang panjang di pesisir selatan Cianjur.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperkuat teori pemberdayaan yang menyatakan bahwa kemandirian ekonomi (*graduasi mandiri*) hanya dapat dicapai melalui sinergi antara aspek perlindungan (*protection*) dan peningkatan kapasitas (*promotion*). Secara praktis, model integratif ini memberikan kerangka kerja bagi pemerintah desa dan daerah dalam merancang program penanggulangan kemiskinan yang tidak lagi bersifat parsial, melainkan menyentuh akar permasalahan modal, teknologi, dan akses pasar secara simultan. Penelitian ini memiliki keterbatasan ruang lingkup yang berfokus pada satu lokus penelitian, yaitu Desa Jayagiri, sehingga dinamika sosial-ekonomi yang ditemukan mungkin memiliki variasi yang berbeda jika dibandingkan dengan kawasan pesisir lain di Jawa Barat Selatan yang memiliki karakteristik geografis berbeda. Selain itu, penelitian ini lebih banyak bersifat kualitatif-deskriptif yang memotret persepsi dan kondisi eksistensial masyarakat, namun belum mengukur dampak ekonomi jangka panjang dari penerapan model integratif tersebut secara kuantitatif melalui analisis pendapatan riil rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Arafah, W., Tawakal, A., Mz, M. D., & Saluy, A. B. (2025). *Strategi Pembangunan Ekonomi Pesisir bagi Pemberdayaan Masyarakat*. Penerbit Berseri.
- BPS. (2024). Persentase Penduduk Miskin Maret 2024 turun menjadi 9,03 persen. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

- Butarbutar, D. N., Sintani, L., & Harinie, L. T. (2020). Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan perempuan. *Journal of Environment and Management*, 1(1), 31-39.
- Creswell, J. W. (2019). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif dan campuran.
- Dewi, A. K. S., & Rusydi, M. (2025). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Nelayan Di Kelurahan Mangkoso Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru. *AKSIOMA: Jurnal Manajemen*, 4(1), 58-65.
- Faoziyah, S. (2020). Intervensi pengembangan masyarakat melalui model pengelolaan pesisir Karangsong Kabupaten Indramayu. In *Proceeding International Conference on Social Work (ICSW)* (pp. 1-21). Faculty of Social Sciences and Political Sciences University of Muhammadiyah Jakarta.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (1992). Analisis data kualitatif. *Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta*.
- Ishatono, I., & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal*, 6(2), 159.
- Jabarprovgoid. (2024). Jumlah Masyarakat Miskin di Jawa Barat Turun. <https://jabarprov.go.id/berita/jumlah-penduduk-miskin-di-jawa-barat-turun14213>
- Kusumaningrum, A. (2013). Kebijakan Pembangunan dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Pesisir (Studi Kasus pada Masyarakat Pesisir di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah). *Agriekonomika*, 2(1), 13-26.
- Mansur, Y. (2024). Analisis perkembangan penduduk miskin, karakteristik kemiskinan dan kedalaman kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Emt Kita*.
- Najib, M. A., Nurjannah, S., & Parama, I. D. M. S. (2024). Menyingkap Realitas Kemiskinan Pada Masyarakat Pesisir di Desa Kuranji Dalang Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat. In *Prosiding Seminar Nasional Mahasiswa Sosiologi* (Vol. 2, No. 1, pp. 69-88).
- Raharjo, S. Y., & Djumiarti, T. (2017). Evaluasi Tahapan Intervensi Sosial Pada Kelompok Nelayan Dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Di Dukuh Tambakrejo Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 6(2), 669-682.
- Sarjito, A. (2023). Efektivitas kebijakan sosial dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan angka kemiskinan. *Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Humaniora*, 6(2), 1-12.
- Setyawan, A. A., Desembrianita, E., Santoso, M. H., & Kalalo, R. R. (2025). Pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kemandirian ekonomi lokal: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(1), 1494-1503.
- Sholichah, H., Al Fajar, A. H., Syamraeni, S., & Mudfainna, M. (2025). Systematic literature review: Pemberdayaan masyarakat inklusif untuk mewujudkan keadilan sosial. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 11(1), 27-40.
- Sipahelut, M., Wiryawan, B., & Nurani, T. W. (2011). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara.
- Syamsuddin, S. (2024). Strategi Nelayan Buruh Bertahan Hidup di Musim Paceklik Di Perairan Teluk Tomini Kabupaten Bonebolango Gorontalo. *The NIKÉ Journal*, 12(1), 055-060.
- Triatmanto, B., Apriyanto, G., & Hidayatullah, S. (2024). *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Wibowo, A., Winarno, J., & Permatasari, P. (2025). Pemberdayaan Nelayan Tradisional dalam Menghadapi Perubahan Sosial di Kabupaten Pacitan. *Jurnal Penyuluhan*, 21(1).